

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA (TPS) SAMPAH PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PEKANBARU

Ernawati, Syapsan dan Hendro Ekwarso

Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: erna720525@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the utilization and management of temporary storage places (TPS) for waste and to determine the factors that cause the number of temporary disposal sites (TPS) for environmental sanitation programs for the ministry of public works and public housing in the city of Pekanbaru. The data used are the results of interviews with the Head of the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service and the Ministry of Public Works for the Work Unit for the Development of Environmental Health for Settlements (PLPP), the people of Pekanbaru City and community leaders, as well as the results of analysis of documents and records. The analysis was carried out by descriptive method, using a qualitative approach to this type of phenomenological research. The results of the analysis show that the management and utilization of temporary waste disposal sites (TPS) can fulfill what the community needs with encouragement and sustainability in TPS management, and socialization is needed about the 3R TPS so that the people of Pekanbaru City can participate in running the program. And the factors causing the management and utilization of temporary waste disposal sites (TPS) in Pekanbaru City such as communication factors, resource support, attitudes and dispositions of officials, bureaucratic structures and community support are not functioning properly.

Keywords: *Evaluation, Management, Utilization, Disposal Sites Meanwhile, Trash*

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pertambahan jumlah penduduk yang dialami oleh suatu wilayah membawa dua sisi dampak sekaligus, yaitu sisi negatif dan positif. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat maka akan mengakibatkan jumlah limbah yang dihasilkan oleh manusia semakin bertambah juga. United Nations Environment Programme (UNEP) Tahun 2015, menjelaskan bahwa kerugian yang timbul akibat pembuangan sampah plastik mencapai USD13 miliar dolar atau sekitar Rp153 triliun per tahun.

Semakin bertambahnya penduduk akan diiringi dengan peningkatan volume timbulan sampah yang dihasilkan dari suatu daerah. Timbulan sampah ditentukan oleh aktivitas masyarakat. Aktivitas tersebut meliputi kegiatan perdagangan, perumahan, perkantoran, perindustrian, pertanian dan lain-lain (Darmasetiawan, 2004). Di Indonesia 19 persen desa/ kelurahan yang terbangun Tempat Penampungan sampah Sementara (TPS). Sekitar 32 persen rumah tangga perkotaan membuang sampah. ke TPS, 14,5 persen rumah tangga perkotaan selalu dan sering membawa tas belanja sendiri, dan 62 persen memberikan barang bekas layak pakai ke orang lain daripada membuangnya (BPS Indonesia, 2019).

Masalah persampahan sangat terkait dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pertumbuhan pesat di sektor industri juga merupakan imbas dari meningkatnya pendapatan rumah tangga dan makin beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan bertambahnya volume, beragamnya jenis, dan karakteristik sampah dan limbah.

Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu kota dengan permasalahan sampah sebagai prioritas permasalahan lingkungan. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 1.118.875 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang besar berkontribusi meningkatkan jumlah timbulan sampah. Data tahun 2018 menunjukkan volume timbulan. Sampah kota Pekanbaru mencapai 492,11 ton/hari, sedangkan volume timbulan sampah yang dikelola dan masuk ke TPA Muara Fajar sebesar 447,50 ton/hari, dan hanya 3 - 5% sampah yang dikelola masyarakat dengan konsep 3R (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2019).

Dampak negatif apabila sampah yang tidak ditangani dengan baik akan berakibat pada tingkat kesehatan maupun lingkungan seperti polusi bau dari sampah yang membusuk, pencemaran air akibat pembuangan sampah ke sungai dan merembesnya air dari tempat pembuangan akhir (TPA) ke permukiman dan sumber air penduduk, pencemaran udara akibat pembakaran sampah. Namun apabila masalah sampah dapat dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak positif. Dampak positif yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah adalah pendapatan daerah melalui retribusi kebersihan. Retribusi kebersihan Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab sebanyak 94 (dua puluh empat) ruas jalan protokol dalam penanganan sampah. Namun kurangnya ketersediaan TPS dianggap sebagai sumber penyebab tidak dapat tertampungnya jumlah sampah rumah tangga dari masyarakat. Untuk TPS *Reduce-Reuse Recycle* (TPS3R) di Kota Pekanbaru yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLPP) berjumlah 13 yang dihibah untuk digunakan ke masyarakat. Penyelenggaraan Program TPS3R merupakan kegiatan pengolahan sampah dengan melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat.

Tabel 1. Nama-Nama TPS3R Beserta Kondisi Fasilitas

No	Nama TPS3R	Tahun Pembangunan	Lokasi (Kecamatan)	Kondisi Fasilitas
1	Limbangan	2015	Rumbai Pesisir	Tidak Berfungsi
2	Maharatu	2015	Marpoyan damai	Berfungsi
3	Tengkerang timur	2015	Tenayan raya	Tidak Berfungsi
4	Kampung bandar	2012	Senapelan	Tidak Berfungsi
5	Tengkerang labuai	2011	Bukit raya	Berfungsi
6	Maharatu	2009	Marpoyan damai	Tidak Berfungsi
7	Maharatu	2008	Marpoyan damai	Tidak Berfungsi

No	Nama TPS3R	Tahun Pembangunan	Lokasi (Kecamatan)	Kondisi Fasilitas
8	Simpang tiga	2008	Bukit raya	Tidak Berfungsi
9	Lembah sari	2008	Rumbai pesisir	Tidak Berfungsi
10	Tuah karya	2015	Tampan	Tidak Berfungsi
11	Kulim	2015	Tenayan raya	Tidak Berfungsi
12	Labuh baru barat	2013	Payung sekaki	Berfungsi
13	Meranti pandak	2013	Rumbai Pesisir	Tidak Berfungsi

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya Dan Direktorat Sanitasi, 2020.

Berdasarkan tabel data diatas terlihat bahwa hanya 3 TPS yang berfungsi di Kota Pekanbaru. Belum berhasilnya pengelolaan dan pemanfaatan TPS3R terletak pada kurangnya peran aktif masyarakat beserta seluruh elemen yang ada. Sehingga keterlibatan semua pihak dalam upaya mengurangi sampah sangat diperlukan supaya menjadikan program TPS3R dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah program penyehatan lingkungan pemukiman kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab banyaknya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah pada program penyehatan lingkungan pemukiman kementerian PUPR di Kota Pekanbaru tidak berfungsi?

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah program penyehatan lingkungan pemukiman kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah pada program penyehatan lingkungan pemukiman kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kota Pekanbaru tidak berfungsi.

KAJIAN PUSTAKA

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut di sebut "evaluasi kebijakan". Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna di pertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai (Nugroho, 2010).

Menurut Winarno (2012) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan . Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut Agustino (2012), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menilai dimensi-dimensi (a) *intentions* (niat), yaitu tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan; (b) *goals* (tujuan), yaitu keadaan akhir yang hendak dicapai; (c) *plans or proposals* (rencana atau usulan), yaitu cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan; dan (d) program yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Dunn (dalam Fischer, et. al, 2014) sifat evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Fokus nilai, dimana evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi fakta-nilai, dimana tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Nugroho (2010) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya sehingga dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dengan melihat fungsi-fungsi evaluasi kebijakan di atas, maka penelitian ini berfungsi sebagai eksplanasi, yaitu hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran masalah, kondisi, aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di Kota Pekanbaru. Winarno (2012) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe yaitu:

1. Tipe Pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
2. Tipe Kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
3. Tipe Ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni (Winarno, 2012):

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

Selanjutnya kriteria evaluasi kebijakan publik diuraikan sebagai berikut (Winarno, 2012) diantaranya, (1) Efektifitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) Responsivitas, (6) Ketepatan. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Menurut Wiyoto (2015) mengidentifikasi ragam riset evaluasi kedalam tujuh tipe utama, yaitu:

1. *Front-end analyses* (evaluasi perencanaan program), merupakan riset evaluasi yang dikembangkan sebelum keputusan tentang sebuah program baru ditetapkan atau sebuah program dilanjutkan.
2. *Evaluability Assessments*, merupakan riset evaluasi yang dilakukan dengan jalan membandingkan asumsi kebijakan yang mendasari sebuah program, dengan apa yang seharusnya dicapai dalam program tersebut, serta menilai rasionalitas asumsi yang dibuat dan kemungkinan (peluang) program dapat mencapai sasarannya.
3. *Cost-benefit and cost-effectiveness* (riset tentang efisiensi program), merupakan tipe evaluasi yang dilakukan dengan teknik membandingkan outputs dan atau outcomes sebuah program, dengan sumberdaya yang telah dikeluarkan.
4. *Proces or implementation evaluation*, merupakan riset evaluasi program dengan menilai sejauh mana sebuah program berjalan seperti yang dikehendaki (ditetapkan). Artinya, mengevaluasi suatu proses dari aktivitas yang ada dalam sebuah program. Isu strategik yang terdapat pada tipe riset ini, yaitu : *how did the program operate?, atau What happened, atau What did the program do?*
5. *Effectiveness, outcome, or impact evaluation*, merupakan riset evaluasi yang ditujukan untuk menilai sejauh mana sebuah program mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan. Riset ini memfokuskan pada output dan outcomes.
6. *Program and problem monitoring* (riset problem monitoring), merupakan tipe riset evaluasi yang memberikan informasi pada program dan problemnya, atau paling tidak tentang rekaman problem yang terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di dalam sebuah variasi wilayah yang dilakukan secara simultan.
7. *Meta-evaluation, evaluation syntheses or comprehensive evaluation*, merupakan tipe evaluasi yang berupaya menganalisis kembali temuan-temuan dari berbagai evaluasi yang telah dilakukan untuk menemukan apa yang dapat dipelajari dari yang telah terjadi tentang sebuah program/kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Keciptakaryaannya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLPP).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini model interatif yang dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi:

1. Reduksi data, dilakukannya proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data karena data yang diperoleh dari lapangan mungkin jumlahnya cukup banyak dan kompleks.
2. Penyajian data, dimana data akan diorganisir dengan baik, disusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

Pembuatan kesimpulan, verifikasi, dan refleksi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan dikategorikan secara sistematis. Verifikasi dilakukan atas informasi lisan maupun dokumentasi. Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan makna di balik ucapan tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan hubungan kausal atau interaksi yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Untuk menjaga kebenaran dan kehandalan data dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan indeksikalitas dan refleksikalitas makna kata, perilaku dan peristiwa atau fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus manajemen. Pada umumnya evaluasi dilakukan setelah perencanaan dilaksanakan, ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefesienan. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan dapat mencapai hasil/tujuan yang diharapkan. Dalam evaluasi, efektifitas digunakan untuk melihat sejauhmana pengelolaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Keciptakarya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah dikota pekanbaru kurang efektif di sebabkan oleh kelembagaan KSM tidak berjalan sebgaimana mestinya serta kurangnya penguatan dari kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan program TPS3R di kota pekanbaru.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan atau program yang dijalankan, kemampuan tersebut untuk menjalankan tugas dengan baik dan tepat yang tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TPS3R untuk pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, baik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum berjalan secara efisien.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Kecukupan

Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dalam hal kecukupan, ketersediaan anggaran dan juga sarana atau armada angkutan kurang mencukupi untuk melaksanakan pemasangan kebersihan di Kota Pekanbaru.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Perataan

Pemerataan berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Artinya perataan berhubungan erat dengan rasionalitas dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pembangunan TPS sampah sudah dilakukan secara merata namun hasilnya belum memuaskan masyarakat Kota Pekanbaru.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Responsivitas

Responsivitas (*responsivennes*) berkenaan dengan seberapa suatu kebijakan/program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudian menjadi penting karena dari penilaian kriteria ini akan dapat memuaskan kriteria-kriteria sebelumnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan dan perataan, karena jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kinerja petugas kebersihan dari KSM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum memuaskan masyarakat Kota Pekanbaru. Bahkan setiap keluhan mengenai kondisi kebersihan kurang ditanggapi dengan cepat atau malah tidak mendapat respon sama sekali.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Kota Pekanbaru berdasarkan Tipe Evaluasi Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan pertanyaan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Artinya ketetapan berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan

dari kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru menilai bahwa kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru kurang tepat.

Aspek yang Mempengaruhi Pengelolaan dan Pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi implemtnasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru seperti faktor komunikasi, dukungan sumber daya, sikap dan disposisi aparat, struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat. Pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru dari sisi komunikasi antara petugas dan ketua KSM sangat besar pengaruhnya, dimana masyarakat Kota Pekanbaru sering tidak menyadari akan pentingnya maksud dan tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah tersebut. Jika saja persoalan kebersihan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atau pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan kebersihan, maka pada dasarnya warga masyarakat Kota Pekanbaru tidak berkeberatan dengan beban yang diberikan kepada mereka.

Masih terbatasnya pengetahuan serta dukungan anggaran untuk memaksimalkan pengelolaan TPS3R dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru sehingga menyebabkan banyak KSM yang tidak aktif. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran untuk operasionalisasi kebersihan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah masih kurang. Karena pengelolaan sampah yang belum optimal, menyebabkan kebersihan dan keindahan kota belum terlihat secara maksimal. Sikap aparatur birokrasi dalam proses pelayanan umum yang masih belum maksimal sehingga menyebabkan proses pelayanan tidak berjalan dengan baik. Jadi sikap pandang dan praktek manajemen yang kurang mengacu kepada hasil (*result oriented*), serta budaya yang counter productive telah menjadi faktor penyebab rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah. Juga dalam hal penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru, pembagian tugas pemungutan yang melibatkan beberapa unit kerja di luar dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru, namun dari struktur yang ada belum tergambar, siapa yang menjadi petugas pemberi layanan kebersihan atau petugas kebersihan. Semuanya hanya berorientasi memungut, tidak beorientasi memberikan layanan. Sehingga dukungan masyarakat dalam upaya perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru diperlukan untuk membantu pemerintah dalam hal pembiayaan operasional atau pengelolaan kebersihan yang harus ditangani secara optimal.

Pembahasan

Seperti telah dikemukakan tujuan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru agar Kota Pekanbaru terjaga kebersihannya, indah dipandang dan bebas dari sampah. Selain itu, ada juga pemikiran pada Walikota yang menyatakan pengelolaan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara instansi terkait. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan

penataan lingkungan perkotaan dan mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan tipe evaluasi, maka dapat dinyatakan bahwa efektivitas pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah di Kota Pekanbaru masih belum optimal yaitu belum mampu mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai kota yang bersih, indah dipandang dan bebas dari sampah, serta belum mampu meningkatkan kontribusinya terhadap kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru.

Implementasi kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah Kota Pekanbaru belum efisien. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TPS sampah berbasis 3 R belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan pelayanan kebersihan belum mampu membuat Kota Pekanbaru bersih, nyaman dan bebas dari sampah. Ketersediaan anggaran dan sarana serta prasarana belum cukup untuk mewujudkan kebersihan di seluruh pelosok Kota Pekanbaru. Kurangnya anggaran dan sarana serta prasarana tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru atas kebersihan kotanya. Akibatnya Kota Pekanbaru belum berhasil menjadi kota bersih, indah dan bebas dari sampah.

Berdasarkan penilaian tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru tersebut dapat dinyatakan bahwa manfaat dari implementasi kebijakan belum dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Bahkan masyarakat yang berada di daerah pinggiran atau pelosok-pelosok merasa belum tersentuh adanya kebijakan kebersihan tersebut. Dalam hal kesopanan masyarakat mengakui bahwa baik petugas pemungut iuran kebersihan maupun petugas pelayanan kebersihan memang bersikap sopan. Namun permasalahannya para petugas tersebut tidak merespon setiap keluhan ataupun kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru akan kebersihan kotanya.

Jadi, bisa dikatakan kebijakan pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru sangat tidak tepat. Oleh karena itu dibutuhkan setiap TPS sampah yang ada di kota Pekanbaru juga pembinaan dan disuport bantuan agar sarana dan prasarana bisa kembali berfungsi dan petugas yang ada di TPS dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya kembali. Namun pada kenyataannya, saat ini Kota Pekanbaru malah terlihat semakin kotor dan sampah berserakan dimana-mana. Ukuran formal atau objektif suatu kota dinilai kota yang bersih dan bebas dari sampah adalah diterimanya penghargaan Adipura untuk kota tersebut.

SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap efektifitas, efisiensi, responsivitas, kecukupan, kesamaan dan ketepatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tempat pembuangan sementara (TPS) sampah di Kota Pekanbaru masih kurang tepat dan belum berjalan dengan baik.

2. Faktor-faktor Penyebab pengelolaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sementara TPS sampah di Pekanbaru banyak yang tidak berfungsi adalah faktor komunikasi, dukungan sumber daya, sikap dan disposisi aparat, struktur birokrasi dan dukungan masyarakat.

Saran

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sementara TPS sampah di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diharapkan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan kecamatan, kelurahan dan KSM dalam meningkatkan pelayanan kebersihan/sampah sehingga masyarakat terpuaskan atas kondisi kebersihan Kota Pekanbaru yang pada akhirnya masyarakat dapat berpartisipasi.
2. Peran pemerintah dan masyarakat sekitar dalam melakukan pengawasan terkait dengan jadwal kerja petugas pemungutan sampah dengan perilaku masyarakat membuang sampah, agar tidak terjadi ketidaksesuaian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo., 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Badan Pusat Statistik Indonesia., 2019, *Environmental Studies: Environmental Quality of Urban Area 2019*, Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup.
- Darmasetiawan, Martin., 2004, *Sarana sanitasi Perkotaan*, Ekamitra Engineering, Jakarta.
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney., 2014, *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, CRC, Pennsylvania.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, dan Direktorat Sanitasi., 2020, *Portrait Kinerja TPS3R*, Jakarta.
- Nugroho, Riant D., 2010, *Otonomi, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Winarno, Budi., 2012). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wiyoto, Budi., 2015, *Riset Evaluasi Kebijakan: Mitos Ketakutan Birokrasi, Instrumen, Strategik, Good Governanace*, Bucetid Malang, Malang.